

Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots

Ein Ausländer und sein Arbeitgeber versichern, dass die Beschäftigung, die dem Visumsantrag zugrunde liegen soll, tatsächlich ausgeübt werden soll, d. h. tatsächlich ein auf Durchführung ausgerichtetes „konkretes Arbeitsplatzangebot“ nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 AufenthG vorliegt und kein reines Scheinarbeitsverhältnis zur Erlangung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 4 des Aufenthaltsgesetzes im Raum steht.

Eine reine Gehaltszahlung ohne Durchführungsabsicht genügt nicht.

Falscherklärungen sind „unrichtige Angaben“ und nach § 95 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG strafbar. Erfolgt die Handlung gegen einen Vermögensvorteil, wäre eine Strafbarkeit nach § 96 Absatz 1 Nummer 2 AufenthG gegeben. Die entsprechenden Qualifikationstatbestände gelten ebenfalls.

Visastellen und Ausländerbehörden haben bei konkreten Anhaltspunkten der Vorspiegelung eines echten Arbeitsverhältnisses, hinter dem sich ein nur zum Schein eingegangenes und daher nach § 117 BGB nichtiges Arbeitsverhältnis verbirgt, die Möglichkeit, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen habe und erkläre gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG, dass ein konkretes Arbeitsplatzangebot im Sinne von § 18 Abs. 2 Nummer 1 AufenthG vorliegt und ich beabsichtige, eine entsprechende Beschäftigung aufzunehmen.

Ort, Datum

Unterschrift

Pengajaran berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 nr. 4a Undang-Undang Izin Tinggal – Tersedianya tawaran tempat kerja yang konkret

Warga negara asing dan pemberi kerjanya menjamin, bahwa hubungan kerja yang merupakan dasar dari permohonan visa, harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peruntukannya, artinya benar-benar terdapat sebuah „tawaran tempat kerja yang konkret“ dengan tujuan pelaksanaan berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 Nomor 1 Undang-Undang izin tinggal dan bukan merupakan sebuah hubungan kerja fiktif untuk mendapatkan izin tinggal sesuai bagian ke 4 dari Undang-Undang izin tinggal.

Pembayaran gaji murni tanpa ada keinginan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat memenuhi syarat.

Pernyataan salah adalah „informasi yang tidak benar“ dan berdasarkan Pasal 95 Ayat 2 Nomor 2 Undang-Undang izin tinggal dapat dipidanakan. Apabila tindakan melanggar hukum tersebut terdapat keuntungan kekayaan, maka hal tersebut dapat dihukum sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 nomor 2 Undang-Undang izin tinggal. Tindakan pelanggaran lainnya yang merupakan perluasan dari pelanggaran utama juga mempunyai konsekuensi hukum.

Bagian visa dan instansi pemerintah untuk warga negara asing mempunyai gambaran konkret yang mencerminkan hubungan kerja yang nyata, apabila ternyata di balik itu hanya merupakan hubungan kerja fiktif, maka sesuai Pasal 117 BGB (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan hubungan kerja tersebut tidak ada dan adanya kemungkinan untuk memproses hal tersebut ke instansi pemerintah penegak hukum.

Dengan tanda tangan saya, saya menegaskan, bahwa saya telah mengetahui petunjuk yang disebutkan di atas dan menyatakan sesuai Pasal 18 Ayat 2 Nomor 4a Undang-Undang izin tinggal, bahwa benar adanya tawaran tempat kerja yang konkret sesuai dengan Pasal 18 Ayat 2 Nomor 1 Undang-Undang izin tinggal dan saya bermaksud untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Tempat, Tanggal

Tanda Tangan